

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Sikap Nasionalisme Mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha

Ida Mahardika

Prodi PPKN Universitas Primagraha

Idamahardika21@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan sikap nasionalisme pada mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha. Penelitian ini merupakan analisis berbagai tantangan mengenai Pendidikan Kewarganegaraan dengan nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme mahasiswa akan meningkat apabila ada kesamaan tujuan, cita-cita dari suatu negara. Mahasiswa yang memiliki sikap nasionalisme perlu mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran untuk mentransfer nilai-nilai nasionalisme yang bertujuan untuk menjadi warga negara yang cinta tanah air, menghargai keanekaragaman budaya, menjunjung tinggi penegakan hukum, memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas, serta dapat berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan hasil mengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan selama satu semester di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha, penerapan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sudah diterapkan dengan baik. Mahasiswa di lingkungan FKIP Universitas Primagraha memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, serta pendidikan kewarganegaraan memiliki peran dalam meningkatkan nasionalisme mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Primagraha.

Kata Kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Nasionalisme, Mahasiswa.

ABSTRACT

This Study aims to determine the role of Citizenship Education in increasing the attitude of nationalism in students at the Faculty of Teacher Training and Education, Primagraha University. This research is an analysis of various challenges regarding Citizenship Education with nationalism in Indonesia. Student nationalism will increase if there is a common goal, ideals of a country. Students who have a nationalistic attitude need to study Citizenship Education from elementary school to university. Citizenship education has a role to transfer the values of nationalism that aim to become citizens who love the homeland, respect cultural diversity, uphold law enforcement, have the spirit to put the interests of the nation and society at large, and can actively participate in building a peaceful life based on Pancasila values system. Based on the results of teaching Citizenship Education courses for one semester at the Teacher Training and Education Faculty, Primagraha University, the implementation of Citizenship Education courses has been implemented well. Students in FKIP Primagraha

University have a high spirit of nationalism, and civic education has a role in increasing the nationalism of students from the teaching and education faculty of Primagraha University.

Keyword: *Citizenship Education, Nationalism, Students.*

PENDAHULUAN

Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah bagaimana menjadikan warga negara yang baik yang mampu mendukung bangsa dan negara. Upaya mewarganegarakan individu atau orang-orang yang hidup dalam suatu negara merupakan tugas pokok negara. Konsep warga negara yang baik (*good citizen*) tentunya amat tergantung dari pandangan hidup dan sistem politik negara. Pada era reformasi dan demokrasi sekarang ini tentunya dibutuhkan pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan membentuk warga negara yang demokratis, yaitu warga negara yang cerdas, berkeadaban, dan bertanggung jawab bagi keberlangsungan negara Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki misi pengembangan *good citizen*. Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sekarang ini menekankan pada peran dalam membentuk warga negara yang cerdas dan baik. Peran tersebut tidak hanya membentuk warga negara hanya mengetahui hak dan kewajibannya tetapi juga memahami tanggung jawab serta partisipasi warga negara. Lahirnya Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membawa perubahan, baik dalam hal konsep, fungsi, tujuan, prinsip penyelenggaraan pendidikan, serta hal-hal lainnya. Dalam pasal 2 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pasal 37 ayat 1 dan 2 kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi harus memuat pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama dan pendidikan bahasa. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik (warga negara) yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Nilai-nilai nasionalisme oleh sebagian pihak dipandang mengalami erosi saat ini, terutama di kalangan generasi muda (Triantoro, 2008). Sebagai warga negara yang hidup di negara yang pluralis, sikap nasionalisme merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki warga negara. Dengan demikian, sudah seharusnya dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar sampai perguruan tinggi mampu membekali warga negara dengan sikap nasionalisme sehingga menjadi penyemangat persatuan generasi mendatang. Meningkatkan sikap nasionalisme pada warga negara memerlukan proses yang berkesinambungan dalam setiap jenjang pendidikan. Mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pengembangan

muatan materi nasionalisme diajarkan melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Melihat realita kehidupan kebangsaan dan kenegaraan saat ini, dengan berbagai krisis dan masalah, maka menjadi sangat penting untuk ditingkatkannya sikap nasionalisme pada mahasiswa karena mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki intelektual, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya. Oleh karena itu, pemahaman secara mendasar tentang nasionalisme sangat penting melalui pendidikan kewarganegaraan agar berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai-nilai Pancasila.

Adapun tujuan peneliti yang ingin dicapai adalah untuk memperoleh gambaran mengenai peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan nasionalisme Mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:9) “Metode Kualitatif digunakan untuk mendapatkan data mendalam, suatu data yang mengandung makna”. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan nilai baik dan tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Nazir (2007:93) “Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode Pengamatan (Observasi), Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip dari Sugiono (2016:145) “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan”.

Dengan teknik seperti ini maka peneliti menganalisis langsung dan melakukan penelitian di Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Primagraha untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan. Dalam metode ini, peneliti langsung meneliti mahasiswa pada saat kegiatan belajar mengajar selama satu semester pada mahasiswa prodi PPKn FKIP Universitas Primagraha. Dengan metode ini, peneliti dapat mengetahui Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Sikap Nasionalisme Mahasiswa Prodi PPKn FKIP Universitas Primagraha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang wajib diberikan di semua jenjang pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi. Yang menjadi tujuan umum pendidikan

kewarganegaraan adalah bagaimana mendidik para mahasiswa sebagai calon intelektual bangsa menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) yang dapat memahami nilai-nilai falsafah negaranya, memiliki kepribadian (*attitude*) yang mantap, berpandangan luas dan bersikap demokratis yang berkeadaban.

Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan penguasaan Ipteks yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan meliputi hubungan antara warga negara dengan negara, pendidikan bela negara yang mengandung nilai-nilai budaya serta dasar filosofi bangsa. Pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila.

Pendidikan Kewarganegaraan harus memenuhi tiga aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan (*skill*), dan pembentukan karakter. Pengetahuan kewarganegaraan merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, pengetahuan tentang struktur sistem politik dan pemerintahan, nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis, cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama, serta hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional. Keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar

diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *civic skill* mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Karakter kewarganegaraan merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri serta kepentingan umum. Pendidikan Kewarganegaraan membentuk warga negara yang baik (*good citizen*). Warga negara yang baik itu pada masa lalu lebih diartikan sesuai dengan tafsir penguasa. Pada masa orde lama, warga negara yang baik adalah warga negara yang berjiwa revolusioner, pancasilais, dan sebagainya. Sejalan dengan visi kewarganegaraan era reformasi, misi dari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa agar mampu menjadi warga negara yang berperan aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan kompetensi sebagai berikut.

1. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggungjawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lain.
4. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Pusat Kurikulum, 2003:3).

Pendidikan kewarganegaraan akan berhasil apabila menumbuhkan sikap mental yang bersifat cerdas dan penuh tanggungjawab pada peserta didik/mahasiswa dengan perilaku yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa, berbudi pekerti luhur, berdisiplin, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bersikap nasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, bersikap rasional yang memiliki kesadaran bela negara, serta aktif memanfaatkan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara. Melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan mahasiswa mampu memahami, menganalisis, serta menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara secara tepat, rasional, konsisten, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dalam rangka mencapai tujuan nasional menjadin warga negara yang tahu hak dan kewajibannya, menguasai ilmu dan teknologi serta seni namun tidak kehilangan jati diri. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk warga negara yang demokratis, yaitu warga negara yang cerdas, berkeadaban dan bertanggung jawab bagi kelangsungan negara Indonesia.

Nasionalisme

Nasionalisme adalah suatu paham. Menurut Anderson (1991), nasionalisme “*it is an imagined political community that is imagined as both inherently limit and sovereign*” yang artinya nasionalisme sebuah politik sebagai kesatuan terbatas dan kekuasaan tertinggi. Pandangan konstruktivis yang dianut Anderson menarik karena meletakkan nasionalisme sebagai sebuah hasil imajinasi dalam membangun sebuah batas yang dikonstruksi secara budaya melalui kapitalisme. Pada masa sekarang, pendidikan kewarganegaraan memiliki misi sebagai pendidikan nasionalisme yang berarti melalui pendidikan

kewarganegaraan diharapkan dapat meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air atau nasionalisme pada diri mahasiswa, sehingga mereka lebih mencintai, merasa bangga, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nasionalisme Indonesia terbentuk dari suatu kahayalan akan suatu bangsa yang mandiri, suatu bangsa yang terikat suatu kesatuan media komunikasi yakni bahasa Indonesia.

Dalam konteks perjuangan merebut kemerdekaan, dibutuhkan suatu konsep sebagai dasar pembenaran rasional dari tuntutan terhadap penentuan masa depan sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa. Dasar pembenaran tersebut selanjutnya mengkristal dalam konsep paham ideologi kebangsaan yang biasa disebut dengan *nasionalisme*. Kemudian lahir konsep-konsep turunannya seperti bangsa, negara dan gabungan keduanya menjadi konsep negara bangsa sebagai komponen-komponen yang membentuk identitas nasional atau kebangsaan. Mengacu pada awal tumbuhnya nasionalisme secara umum, maka nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkraman kolonial. Semangat nasionalisme diharapkan secara efektif oleh para penganutnya dan dipakai sebagai metode perlawanan dan alat identifikasi.

Dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia saat ini, ada kecenderungan luntarnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air, baik karena faktor internal maupun karena pengaruh global. Hal ini terlihat dari berbagai persoalan bangsa Indonesia sekarang misalnya adanya upaya disintegrasi bangsa, konflik antar etnis/kelompok, merajalelanya tauran baik antar warga maupun pelajar. Disisi lain, sikap mental para politisi bangsa yang

tidak mencerminkan sebagai politikus yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Upaya penanaman rasa nasionalisme melalui institusi pendidikan nasional sesungguhnya sudah ada sejak tahun 1945 yang ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Namun dalam perjalanan instrumentasi dan praksisnya sangat fluktuatif, sesuai dengan iklim sosial-politik terkait dengan kebijakan politik kenegaraan pada setiap kepemimpinan nasional. Dalam perkembangannya, secara implisit upaya penanaman rasa nasionalisme telah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam usulan BP KNIP tanggal 29 Desember 1945 dikemukakan bahwa pendidikan dan pengajaran harus membimbing peserta didik menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggungjawab. Untuk mendidik warga negara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Perasaan cinta kepada negara
3. Perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan
4. Perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya
5. Keyakinan bahwa orang menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat
6. Keyakinan bahwa orang yang hidup bermasyarakat harus tunduk pada tata tertib
7. Keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama derajatnya sehingga sesama anggota masyarakat harus saling menghormati, berdasarkan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri

8. Keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, mengetahui kewajiban, dan jujur dalam pikiran dan tindakan.

Disamping itu, upaya penanaman rasa nasionalisme kurang menggembirakan nampaknya hal itu diperkuat oleh keadaan lingkungan sosial kultural dan sosial politik yang tidak kondusif, yang memang sejak tahun 1945 sampai saat ini terkesan masih menunjukkan ciri undemocratic democracy yaitu suatu keadaan dimana perangkat demokrasinya sudah ada, tetapi semangat dan perwujudannya masih jauh dari cita-cita demokrasi yang memang dirasakan selalu menimbulkan kontroversi antara realita dengan norma, anatara yang dilihat, didengar, dan yang dialami dengan yang diajarkan. Secara psikologis dan sosial keadaan seperti itu tidak menguntungkan bagi proses pendidikan karena keadaan lingkungan sekitar hanya memberi penguatan negatif terhadap tumbuhnya sikap dan perilaku yang positif. Tantangan konseptual tersebut perlu dibangunnya paradigma baru pendidikan yang merupakan bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan dan proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai suatu keutuhan.

Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan secara metodologis menuntut perbaikan dalam dimensi-dimensi sebagai berikut, yakni dalam *curriculum content and instructional strategies; civic education classroom; and learning environment*. Implikasinya bahwa kurikulum dan strategi pembelajaran seyogyanya dikembangkan secara sistemik (lintas jenjang, jalur dan bidang), dengan konsep yang komprehensif (utuh dan lengkap), dan dengan organisasi kurikulum yang berdiverifikasi merujuk kepada perkembangan kognitif, afektif, sosial-moral, dan skill. Serta lingkungan belajar setempat (desa-kota). Dengan kata lain, kurikulum perlu mengandung aspek ideal

yang bersifat nasional, aspek instrumental yang bercorak ragam, dan aspek praksis yang adaptif terhadap lingkungan setempat. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran perlu mengandung muatan nasional, muatan regional dan muatan lokal.

Pendekatan pembelajaran yang disarankan untuk dikembangkan adalah yang berorientasi pada proses berpikir kritis dan pemecahan masalah. Salah satu model pembelajaran yang kini secara internasional diterapkan secara adaptif adalah model “*Project Citizen*” model ini dekanal sebagai *A portfolio based civic education project* yang dirancang untuk mempraktekan salah satu hak warga negara. Dengan cara melibatkan siswa melalui suatu “proyek belajar”. Dengan demikian, kesenjangan yang melahirkan kontroversi antara yang dipelajari di sekolah dengan yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dapat diminimumkan. Oleh karena itu, metode harus bervariasi sesuai dengan kebutuhan interaksi kelas. Ceramah, tanya jawab, dan diskusi tentu saja masih dipandang penting terutama untuk memberikan penjelasan dasar-dasar ilmiah serta materi esensial yang menjadi *basic concept* masalah yang dibahas. Akan tetapi model pembelajaran *problem solving, inquiry*, klarifikasi nilai, *Science Tecnology and society* serta *portfolio Based Learning*.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Sikap Nasionalisme Mahasiswa

Kondisi Indonesia saat ini merupakan dampak adanya kultur yang terus menerus (globalisasi). Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang diterjemahkan keberbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan realitas pluralitas agama dan multikultural yang dipahami dalam kehidupan bermasyarakat. Secara

antropologis bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multikultur terdiri dari keberagaman suku bangsa, etnis, agama dan adat. Keberagaman rentan konflik baik vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa ini (warga negara Indonesia) harus memiliki rasa nasionalisme dan kemampuan sikap untuk mampu berpikir kritis, mampu mendengarkan, mampu mengungkapkan pendapat. Hal tersebut menjadi modal dasar untuk menumbuhkembangkan sikap saling menghargai antar sesama. Selain itu, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan bersama-sama mendorong tujuan nasional serta menunjukkan identitas nasional. Adapun perilaku yang menghargai keberagaman negara Indonesia yakni menghargai perbedaan suku, agama, ras dan etnis, mengembangkan sikap toleransi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada secara damai.

Berdasarkan hasil mengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan selama satu semester di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha, penerapan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sudah diterapkan dengan baik. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah dasar umum (MKDU) di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha sehingga yang menjadi tujuan dari mata kuliah ini sudah tercapai dengan respon yang baik. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia juga berkontribusi penting dalam menunjang tujuan bernegara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan secara sistematis adalah perwujudan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, pendidikan kewarganegaraan berkaitan dan berjalan seiring dengan perjalanan pembangunan

kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan dikatakan, pendidikan nasional kita hakikatnya adalah pendidikan kewarganegaraan agar dilahirkan warga negara Indonesia yang berkualitas baik dalam disiplin sosial dan nasional. Hasil dari analisis selama mengajar, bahwa penerapan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah dasar umum (MKDU) berperan penting dalam meningkatkan nasionalisme mahasiswa FKIP Universitas Primagraha. Hal ini berkaitan dengan materi pendidikan kewarganegaraan mengenai penerapan perkuliahan mempengaruhi nasionalisme mahasiswa.

KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan dapat meningkatkan sikap nasionalisme mahasiswa apabila dilaksanakan pembelajaran yang sesuai yang dapat menyeimbangkan antara pengembangan kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam menghadapi berbagai permasalahan terkisusnya nasionalisme di era globalisasi. Harus adanya upaya khusus dalam penanaman rasa nasionalisme, karena sebuah bangsa dan negara akan kehilangan jati diri apabila warga negaranya tidak memiliki rasa nasionalisme. Tentunya melalui strategi pendidikan, strategi pembelajaran, model dan pendekatan yang terintegrasi dengan isu-isu global. Hal tersebut menjadi dasar untuk membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang cerdas dan baik berdasarkan pengamalan nilai dasar dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Penerapan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam meningkatkan nasionalisme mahasiswa di lingkungan FKIP Universitas Primagraha. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah dasar umum yang tergabung dalam mata kuliah pengembangan kepribadian memberikan kontribusi dalam meningkatkan rasa nasionalisme

mahasiswa. Peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan nasionalisme mahasiswa untuk mengembangkan kepribadian yang diterapkan langsung di lingkungan kampus sudah dilaksanakan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi sebagaimana tujuan dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Mahasiswa di lingkungan FKIP Universitas Primagraha diantaranya mahasiswa prodi PPKn, Pendidikan Matematika, PJKR dan PGSD memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, serta pendidikan kewarganegaraan memiliki peran dalam meningkatkan nasionalisme mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Primagraha.

DAFTAR PUSTAKA

- Kalean. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma
- Rahaditya. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Tangerang: Pustaka Mandiri.
- Winarno. 2016. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hans Kohn. 1984. *Nasionalisme dan Sejarahnya*. Jakarta: Erlangga.
- Winataputra. 2003. *Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Sugiono. 2015. *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.

Surat Keputusan Dirjen Dikti No.
43/Dikti/2006 tentang
Rambu-rambu
Pelaksanaan Mata
Kuliah Pengembangan
Kepribadian di
Perguruan Tinggi.

Undang – Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 12
Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan.

Undang – Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan
Nasional.